



## FRAMING HOAKS POLITIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE INDONESIA: KAJIAN HERMENEUTIKA ATAS REPRESENTASI KRISIS DEMOKRASI

Cartono<sup>1</sup>, Asriyanti Rosmalina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

<sup>1,2</sup>Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Indonesia

<sup>1</sup> cartono77@syekhnurjati.ac.id; <sup>2</sup>asriyantirosmalina@syekhnurjati.ac.id)  
(0857-9338-5454)

Diterima tgl. 23 Maret 2026. Direvisi tgl. 27 April 2026. Disetujui tgl. 29 April 2026

### ABSTRACT

*The proliferation of political hoaxes in Indonesian online media has increasingly threatened the quality of democracy, particularly during the 2024 general election. This study aims to analyze how political hoaxes are framed in online media coverage and how such framing constructs the representation of a democratic crisis. The research employs a qualitative approach within a constructivist paradigm, combining Robert N. Entman's framing analysis with a hermeneutic approach. The data consist of news texts from national online media platforms such as Kompas.com, Detik.com, and Tirto.id, published between 2023 and 2025, collected through documentation techniques. The findings reveal that media consistently apply a normative framing structure that positions hoaxes as threats to democracy, while simultaneously constructing narratives of declining public trust, social polarization, and the dominance of post-truth logic. Furthermore, the framing is influenced by socio-political contexts and the characteristics of digital media. These findings imply that online media not only reflect reality but also actively shape democratic discourse, highlighting the need for stronger media literacy and journalistic professionalism.*

**Keywords:** media framing, political hoaxes, democracy, online media, hermeneutics.

### ABSTRAK

Fenomena hoaks politik dalam media online Indonesia semakin meningkat dan berpotensi mengganggu kualitas demokrasi, terutama dalam momentum Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana framing hoaks politik dalam pemberitaan media online serta bagaimana makna yang dihasilkan merepresentasikan krisis demokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme melalui analisis framing model Robert N. Entman dan pendekatan hermeneutika. Data berupa teks berita dari media online nasional seperti Kompas.com, Detik.com, dan Tirto.id periode 2023–2025 yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media secara konsisten menggunakan struktur framing yang bersifat normatif dengan menempatkan hoaks sebagai ancaman terhadap demokrasi, sekaligus membangun narasi tentang krisis kepercayaan publik, polarisasi, dan dominasi logika post-truth. Selain itu, framing dipengaruhi oleh konteks sosial-politik dan karakteristik media digital. Temuan ini mengimplikasikan bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk wacana demokrasi, sehingga diperlukan penguatan literasi media dan profesionalisme jurnalistik.

**Kata Kunci:** framing media, hoaks politik, demokrasi, media online, hermeneutika.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan media digital di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap komunikasi politik secara signifikan. Media online tidak lagi sekadar menjadi saluran distribusi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai arena produksi makna yang sarat kepentingan ideologis dan politik. Dalam konteks ini, fenomena hoaks politik muncul sebagai salah satu problem utama yang mengancam kualitas demokrasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa penyebaran misinformasi dan disinformasi meningkat tajam terutama menjelang momentum politik seperti pemilihan umum 2024, di mana hoaks digunakan sebagai instrumen mobilisasi opini publik dan delegitimasi lawan politik (Subekti et al., 2025; Belinda et al., 2024).

Bahkan, laporan kebijakan nasional mencatat ribuan konten hoaks teridentifikasi setiap tahun, yang menunjukkan skala masif dari problem ini (Tobing et al., 2024).

Secara normatif, media dalam sistem demokrasi ideal diharapkan berperan sebagai pilar keempat (*fourth estate*) yang menjamin penyampaian informasi akurat, objektif, dan berimbang. Namun, kondisi empiris menunjukkan adanya deviasi dari fungsi ideal tersebut. Media online kerap terlibat dalam praktik framing yang tidak netral, termasuk dalam merepresentasikan isu hoaks politik. Framing ini tidak hanya menentukan bagaimana realitas dikonstruksi, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi demokrasi itu sendiri (Pratama et al., 2025; Iskandar & Suryawati, 2023). Dalam banyak kasus, media justru memperkuat polarisasi melalui penyajian narasi yang emosional, biner, dan bias, sehingga memperdalam krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi (Siregar, 2025).

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya krisis demokrasi yang tidak semata-mata bersifat institusional, tetapi juga diskursif. Krisis ini termanifestasi dalam bentuk erosi rasionalitas publik, melemahnya deliberasi, serta dominasi logika post-truth dalam ruang publik digital. Hoaks politik tidak lagi sekadar informasi palsu, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang terstruktur dan sistematis, yang sering kali diperkuat oleh framing media (Yilmaz et al., 2024; Suherman et al., 2026). Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana media online di Indonesia membingkai (frame) hoaks politik, serta bagaimana framing tersebut merepresentasikan dan sekaligus mereproduksi krisis demokrasi.

Pendekatan hermeneutika menjadi relevan dalam mengkaji persoalan ini karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap makna teks, konteks, dan proses interpretasi dalam produksi berita. Hermeneutika tidak hanya membaca teks sebagai produk komunikasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mencerminkan relasi kekuasaan, ideologi, dan horizon pemahaman tertentu (Fensi, 2025; Andreas, 2024). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana media tidak sekadar melaporkan hoaks politik, tetapi juga mengonstruksi makna tertentu yang berimplikasi pada persepsi krisis demokrasi.

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis framing hoaks politik dalam pemberitaan media online Indonesia dengan menggunakan perspektif hermeneutika. Fokus penelitian diarahkan pada: (1) bagaimana struktur framing digunakan dalam pemberitaan hoaks politik; (2) bagaimana makna yang dihasilkan dari framing tersebut merepresentasikan krisis demokrasi; dan (3) bagaimana konteks sosial-politik memengaruhi proses konstruksi makna dalam teks media. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian komunikasi politik dan media, tetapi juga memberikan pemahaman kritis mengenai dinamika demokrasi digital di Indonesia.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan analisis hermeneutika terhadap teks berita media online. Data berupa artikel berita yang memuat isu hoaks politik dikumpulkan dari media online nasional yang memiliki jangkauan luas. Analisis dilakukan melalui proses interpretasi berlapis, yang mencakup pemahaman teks, konteks produksi, serta horizon makna yang melatarbelakanginya. Strategi ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap dimensi laten dari framing media yang tidak selalu tampak secara eksplisit.

Dengan mengisi celah antara studi framing media dan pendekatan hermeneutika dalam konteks hoaks politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya perspektif analisis media dengan pendekatan interpretatif yang lebih mendalam. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat

menjadi dasar bagi penguatan literasi media dan kebijakan komunikasi publik dalam menghadapi krisis disinformasi yang semakin kompleks di era digital.

Pendahuluan harus menyajikan masalah spesifik yang diteliti dan menggambarkan strategi penelitian. Pengantar yang baik harus meringkas argumen dan data yang relevan, untuk memberi pembaca pengertian yang jelas tentang apa yang telah dilakukan dan mengapa. Atau pengantar berisi penjelasan tentang kondisi yang seharusnya dan kondisi yang ada sehingga terlihat celah-celah kondisi ideal yang harus dilakukan dengan fakta-fakta di lapangan atau biasa disebut masalah. Bagian ini juga menjelaskan latar belakang atau alasan yang mendorong penulis untuk menyelidiki atau membahas masalahnya. Karena penelitian atau diskusi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sesuatu atau berniat untuk menyumbangkan pemikiran untuk perbaikan, maka alasannya harus dikembangkan berdasarkan data konkret yang ada.

### 1.1. Tinjauan literatur

Kajian mengenai framing media, hoaks politik, dan demokrasi digital dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap peran media dalam membentuk realitas politik di era disinformasi. Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif mbingkai isu politik dan memengaruhi persepsi publik. Penelitian Iskandar dan Suryawati (2023) menunjukkan bahwa dalam konteks Pemilu 2024, media memiliki peran penting dalam membentuk komunikasi publik terkait hoaks. Studi ini menemukan bahwa framing media sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan berkontribusi terhadap terbentuknya polarisasi serta *echo chamber* di masyarakat. Sejalan dengan itu, Pratama, Bajari, dan Fadilah (2025) mengungkap bahwa framing media dalam pemberitaan pemilu dapat memperkuat persepsi publik terhadap isu kecurangan dan legitimasi hasil pemilu, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya ketegangan politik.

Selanjutnya, Belinda, Somantri, dan Runturambi (2024) menyoroti bahwa hoaks politik dalam Pemilu Indonesia merupakan bagian dari strategi komunikasi politik di era *post-truth*. Penelitian ini menunjukkan bahwa disinformasi digunakan secara sistematis untuk membentuk opini publik dan menyerang legitimasi lawan politik. Temuan ini diperkuat oleh Ahdarrijal dan Rahmawati (2024) yang menyatakan bahwa media digital mempercepat penyebaran hoaks dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik, terutama karena karakteristiknya yang cepat dan viral.

Sementara itu, penelitian Nabila, Fitriana, dan Meisya (2025) menunjukkan bahwa maraknya disinformasi berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Studi ini menekankan bahwa framing media berperan dalam membentuk cara publik memahami realitas politik, termasuk dalam konteks krisis legitimasi demokrasi.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara framing media, hoaks politik, dan demokrasi, sebagian besar masih berfokus pada aspek struktural atau dampak disinformasi. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana makna hoaks politik dikonstruksi dalam teks media melalui pendekatan interpretatif seperti hermeneutika. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis framing dan hermeneutika untuk memahami bagaimana hoaks politik direpresentasikan sebagai bagian dari wacana krisis demokrasi di media online Indonesia.

### 1.2. Teori/Konsep

Artikel perlu menguraikan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian pada bagian terpisah agar lebih fokus. Panjang uraian teori/konsep dibuat proporsional.

a. Framing Media dalam Komunikasi Politik

Framing merupakan konsep kunci dalam studi komunikasi yang menjelaskan bagaimana media mengonstruksi realitas melalui seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Dalam perspektif Robert N. Entman, framing mencakup empat elemen utama, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgments*, dan *suggest remedies* (Farid, 2024). Melalui mekanisme ini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk interpretasi publik terhadap isu politik. Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa framing media memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi publik dalam isu politik, khususnya pada momentum elektoral. Misalnya, studi Hakim dan Nurabwani (2024) menunjukkan bahwa media online cenderung menggunakan framing tertentu untuk mengarahkan interpretasi publik terhadap kandidat politik. Hal ini diperkuat oleh Indainanto et al. (2025) yang menemukan bahwa framing politik di media digital, termasuk media sosial, mampu membentuk opini publik sekaligus memperkuat polarisasi politik.

Framing dalam media online sering kali tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ideologis, ekonomi, maupun politik. Penelitian Nuraini et al. (2024) menunjukkan bahwa perbedaan framing antarmedia dapat menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Dengan demikian, framing menjadi instrumen strategis dalam produksi makna politik di ruang publik digital.

b. Hoaks Politik dan Disinformasi dalam Era Digital

Hoaks politik merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas, yaitu *information disorder*, yang mencakup misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Dalam konteks demokrasi digital, hoaks tidak hanya berfungsi sebagai informasi palsu, tetapi juga sebagai alat politik yang digunakan untuk memengaruhi opini publik dan merusak legitimasi institusi demokrasi (Subekti et al., 2025). Penelitian Belinda et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam Pemilu Indonesia 2024, hoaks digunakan secara sistematis dalam strategi komunikasi politik, terutama dalam bentuk kampanye hitam (*black campaign*) dan manipulasi informasi. Sementara itu, studi Yilmaz et al. (2024) menegaskan bahwa hoaks dan disinformasi berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi sosial serta melemahnya kohesi demokrasi.

Selain itu, laporan kebijakan oleh Tobing et al. (2024) mengungkap bahwa Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam jumlah konten hoaks setiap tahun, terutama di platform digital. Fenomena ini diperparah oleh karakteristik media online yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas tanpa verifikasi yang memadai. Dalam perspektif komunikasi, hoaks politik juga berkaitan erat dengan framing media. Seperti dijelaskan oleh Siregar (2025), framing yang bersifat emosional dan bias dalam pemberitaan dapat memperkuat efek hoaks dengan menciptakan narasi yang meyakinkan bagi audiens. Dengan demikian, hubungan antara framing media dan hoaks politik bersifat saling memperkuat dalam membentuk persepsi publik.

c. Media Online dan Krisis Demokrasi

Media online memiliki peran ambivalen dalam demokrasi. Di satu sisi, media digital memperluas akses informasi dan partisipasi publik. Namun, di sisi lain, media online juga menjadi ruang subur bagi penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat merusak kualitas demokrasi (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024). Penelitian Widodo dan Kristiyono (2025) menunjukkan bahwa transformasi komunikasi politik digital di Indonesia telah memunculkan tantangan baru, seperti disinformasi, polarisasi, dan fragmentasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak selalu menghasilkan ruang publik yang rasional, melainkan sering kali justru didominasi oleh logika post-truth.

Lebih lanjut, Suherman et al. (2026) menegaskan bahwa disinformasi memiliki dampak langsung terhadap integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dalam konteks ini, media online tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam membentuk krisis demokrasi melalui praktik framing tertentu.

d. Hermeneutika sebagai Pendekatan Analisis Media

Hermeneutika merupakan pendekatan interpretatif yang menekankan pemahaman makna teks dalam konteks sosial dan historisnya. Dalam studi media, hermeneutika digunakan untuk mengungkap bagaimana teks media tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga mengonstruksi makna melalui proses interpretasi (Fensi, 2025). Pendekatan hermeneutika memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap framing media, karena tidak hanya melihat struktur teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks produksi dan horizon pemahaman yang melatarbelakanginya. Andreas (2024) menegaskan bahwa pendekatan hermeneutik relevan dalam menganalisis fenomena komunikasi digital yang kompleks, termasuk hoaks dan disinformasi.

Selain itu, penelitian Sianipar et al. (2026) menunjukkan bahwa analisis hermeneutika dapat mengungkap pola konstruksi narasi media yang tersembunyi, termasuk bias ideologis dan strategi diskursif dalam pemberitaan politik. Dengan demikian, hermeneutika memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami relasi antara teks, konteks, dan makna dalam media.

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa terdapat relasi yang erat antara framing media, hoaks politik, dan krisis demokrasi. Framing media berperan dalam mengonstruksi makna hoaks politik, yang pada gilirannya memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi demokrasi. Dalam konteks ini, hoaks tidak hanya diproduksi di luar media, tetapi juga direproduksi melalui praktik framing dalam pemberitaan. Penelitian Kulsum et al. (2025) menunjukkan bahwa framing media dalam konteks misinformasi dapat membentuk ruang publik digital yang terfragmentasi. Sementara itu, Nema et al. (2025) menekankan bahwa dalam era post-truth, framing media menjadi alat utama dalam membentuk realitas sosial yang sering kali tidak lagi berbasis fakta, melainkan pada narasi yang persuasif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang diproduksi melalui praktik diskursif, termasuk dalam teks media. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana media online membingkai hoaks politik serta bagaimana makna tersebut merepresentasikan krisis demokrasi. Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan analisis framing model Robert N. Entman dengan pendekatan hermeneutika. Objek penelitian ini adalah pemberitaan media online Indonesia yang mengangkat isu hoaks politik, khususnya dalam konteks dinamika demokrasi kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada struktur framing yang digunakan media, konstruksi makna yang dihasilkan, serta representasi krisis demokrasi yang muncul dalam teks berita. Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berita yang mencakup judul, lead, isi berita, serta kutipan narasumber yang dipublikasikan oleh media online nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran digital terhadap artikel berita yang relevan dengan isu hoaks politik. Data dikumpulkan dalam rentang waktu periode politik kontemporer, terutama menjelang dan selama Pemilu 2024, yakni antara tahun 2023 dan 2025, mengingat pada periode tersebut intensitas penyebaran hoaks politik cenderung meningkat. Pemilihan data dilakukan secara purposive dengan kriteria tertentu, yaitu berita yang secara eksplisit memuat isu hoaks politik, dipublikasikan oleh media online nasional, serta memiliki relevansi dengan konteks demokrasi dan menunjukkan adanya konstruksi framing dalam penyajiannya (Holil, 2023).

Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama, analisis framing menggunakan model Robert N. Entman yang meliputi empat elemen, yaitu pendefinisian masalah (*define problems*), penentuan penyebab (*diagnose causes*), penilaian moral (*make moral judgment*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana media membingkai isu hoaks politik dalam pemberitaannya. Kedua, hasil analisis framing tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan pendekatan hermeneutika, yang mencakup pemahaman teks, konteks produksi, serta horizon makna yang melatarbelakanginya. Melalui proses ini, penelitian berupaya mengungkap makna laten, ideologi, serta relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam teks media.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap teks pemberitaan media online Indonesia (Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, dan Tirto.id) mengenai hoaks politik periode 2023–2025, temuan penelitian disusun sesuai dengan fokus penelitian, yaitu struktur framing, representasi makna krisis demokrasi, dan konteks sosial-politik yang memengaruhi konstruksi makna.

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### a. Struktur Framing dalam Pemberitaan Hoaks Politik

Hasil analisis terhadap sejumlah pemberitaan hoaks politik di media online menunjukkan bahwa struktur framing yang digunakan media cenderung konsisten dan mengikuti pola sebagaimana dikemukakan oleh Robert N. Entman. Struktur tersebut tampak dalam cara media mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan solusi terhadap isu hoaks yang diberitakan.

Tabel 1. Analisis Framing Model Entman

<b>Kasus Hoaks</b>	<b>Define Problems</b>	<b>Diagnose Causes</b>	<b>Moral Judgment</b>	<b>Treatment Recommendation</b>
Surat suara tercoblos	Disinformasi yang merusak kepercayaan pemilu	Manipulasi konten lama di media sosial	Tindakan menyesatkan publik	Verifikasi ke KPU & sumber resmi
Quick count dimanipulasi	Delegitimasi pemilu	Narasi politik tanpa bukti	Memicu konflik & polarisasi	Tunggu hasil resmi KPU
Perpanjangan masa jabatan	Distorsi konstitusi	Misinterpretasi & reproduksi hoaks	Manipulasi opini publik	Edukasi konstitusi & literasi

Dalam kasus hoaks “surat suara tercoblos” yang dimuat oleh Kompas.com melalui kanal Cek Fakta, media secara jelas mendefinisikan masalah sebagai bentuk disinformasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Potongan berita yang menyatakan bahwa “video yang diklaim sebagai surat suara yang sudah tercoblos sebelum hari pemungutan suara adalah tidak benar” menunjukkan upaya media untuk langsung mengoreksi informasi sekaligus menegaskan posisi sebagai penyedia kebenaran. Dalam konteks ini, penyebab hoaks diarahkan pada manipulasi konten lama yang disebarkan ulang melalui media sosial, sementara penilaian moral yang dibangun mengarah pada kecaman terhadap praktik penyebaran informasi yang menyesatkan.

Solusi yang ditawarkan menekankan pentingnya verifikasi melalui sumber resmi seperti KPU.

Pola yang serupa juga terlihat dalam pemberitaan Detik.com pada rubrik Hoaks atau Fakta terkait narasi “hasil quick count dimanipulasi”. Dalam berita tersebut, media tidak hanya membantah klaim yang beredar, tetapi juga membangun argumentasi bahwa lembaga survei memiliki metodologi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kutipan seperti “narasi yang menyebut hasil quick count telah diatur tidak memiliki dasar” menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan klarifikasi, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi yang terlibat dalam proses demokrasi. Di sini, framing diarahkan untuk meredam potensi delegitimasi terhadap hasil pemilu.

Sementara itu, dalam kasus hoaks mengenai “perpanjangan masa jabatan presiden tanpa pemilu” yang diklarifikasi oleh Tirto.id, struktur framing menunjukkan penekanan yang lebih kuat pada aspek edukatif. Media tidak hanya menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip konstitusi yang berlaku. Pernyataan bahwa informasi tersebut “bertentangan dengan konstitusi” menunjukkan bahwa framing diarahkan untuk membangun pemahaman publik terhadap sistem demokrasi secara lebih substantif.

#### b. Representasi Makna: Framing Hoaks dan Krisis Demokrasi

Melalui pendekatan hermeneutika, analisis terhadap teks berita menunjukkan bahwa framing hoaks politik menghasilkan makna yang melampaui sekadar klarifikasi informasi. Media secara implisit membangun representasi bahwa maraknya hoaks merupakan indikasi adanya krisis dalam praktik demokrasi di Indonesia. Dalam berbagai pemberitaan, penggunaan diksi seperti “merusak kepercayaan publik”, “menyesatkan masyarakat”, dan “tidak memiliki dasar” menunjukkan adanya konstruksi makna yang menempatkan hoaks sebagai ancaman serius terhadap legitimasi demokrasi. Pada kasus Kompas.com, misalnya, penekanan pada dampak hoaks terhadap kepercayaan pemilih mengindikasikan bahwa demokrasi dipahami sebagai sistem yang sangat bergantung pada kepercayaan publik. Ketika hoaks menyebar, yang terancam bukan hanya informasi, tetapi juga legitimasi proses demokrasi itu sendiri.

Pada kasus Detik.com, framing terhadap hoaks *quick count* memperlihatkan bagaimana media berupaya menjaga kredibilitas institusi demokrasi. Dengan menegaskan transparansi metodologi lembaga survei, media secara tidak langsung mengonstruksi narasi bahwa demokrasi tetap berjalan secara sah dan dapat dipercaya, meskipun di tengah maraknya disinformasi. Namun, pada saat yang sama, keberadaan hoaks tersebut justru memperkuat kesan bahwa demokrasi sedang berada dalam tekanan.

Sementara itu, Tirto.id melalui pendekatan yang lebih edukatif memperluas makna hoaks sebagai ancaman terhadap tatanan konstitusional. Dengan menegaskan bahwa informasi yang beredar bertentangan dengan konstitusi, media tidak hanya meluruskan fakta, tetapi juga mengingatkan publik tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa framing hoaks juga berfungsi sebagai sarana reproduksi nilai-nilai demokrasi. Interpretasi hermeneutik menunjukkan bahwa framing media menghasilkan narasi yang konsisten mengenai kerentanan demokrasi. Hoaks tidak hanya dipahami sebagai fenomena komunikasi, tetapi juga sebagai gejala dari melemahnya rasionalitas publik dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi. Dengan demikian, media berperan ganda, yaitu sebagai penangkal hoaks sekaligus sebagai produsen wacana tentang krisis demokrasi

c. Konteks Sosial-Sosial Politik dalam Konstruksi Makna Media

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa framing hoaks politik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik yang melingkupinya. Seluruh kasus yang dianalisis muncul dalam periode menjelang dan selama Pemilu 2024, yang merupakan momen dengan intensitas kontestasi politik yang tinggi. Dalam konteks tersebut, hoaks tidak hanya berfungsi sebagai informasi palsu, tetapi juga sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. Narasi seperti “pemilu dicurangi” atau “hasil telah diatur” mencerminkan adanya upaya untuk memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi proses demokrasi. Media kemudian merespons fenomena ini dengan membingkai hoaks dalam kerangka konflik politik, baik sebagai bentuk delegitimasi maupun sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial.

Selain faktor politik, perkembangan media digital juga memainkan peran penting dalam konstruksi framing. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial menyebabkan hoaks dengan mudah menjadi viral sebelum sempat diverifikasi. Dalam situasi ini, media online dituntut untuk merespons secara cepat, yang pada akhirnya memengaruhi gaya pemberitaan. Framing yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada akurasi, tetapi juga pada kecepatan dan daya tarik narasi.

Di sisi lain, media juga mengaitkan penyebaran hoaks dengan kondisi masyarakat, khususnya rendahnya literasi digital. Dalam beberapa pemberitaan, publik digambarkan sebagai pihak yang rentan terhadap informasi yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi makna dalam teks media tidak hanya ditujukan pada aktor politik, tetapi juga pada kondisi sosial yang lebih luas.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, dapat dipahami bahwa framing hoaks politik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor, yaitu dinamika politik, karakteristik media digital, dan kondisi sosial masyarakat. Media tidak berdiri sebagai entitas yang netral, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang turut membentuk dan dipengaruhi oleh realitas sosial-politik tersebut.

### 3.2. Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa framing hoaks politik dalam media online Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme klarifikasi informasi, tetapi juga sebagai praktik diskursif yang membentuk realitas sosial dan persepsi publik terhadap demokrasi. Dalam konteks ini, pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu struktur framing, konstruksi makna, dan pengaruh konteks sosial-politik, yang kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori framing dan hermeneutika.

Pertama, dari sisi struktur framing, hasil penelitian menunjukkan bahwa media secara konsisten menggunakan pola framing sebagaimana dirumuskan oleh Entman, yakni pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi. Namun, temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan struktur tersebut tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan orientasi normatif. Media cenderung mendefinisikan hoaks sebagai ancaman serius terhadap demokrasi, mengarahkan penyebab pada aktor tertentu (baik individu, kelompok, maupun ekosistem digital), serta memberikan penilaian moral yang tegas terhadap praktik disinformasi. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama et al. (2025) yang menyatakan bahwa framing media dalam isu politik sering kali memperkuat narasi tertentu yang berdampak pada persepsi publik. Dengan demikian, framing tidak hanya berfungsi sebagai alat penyajian informasi, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi nilai-nilai demokrasi.

Kedua, pada level makna, pendekatan hermeneutika mengungkap bahwa framing hoaks politik menghasilkan konstruksi makna yang lebih dalam daripada sekadar klarifikasi fakta. Media secara implisit membangun narasi bahwa demokrasi Indonesia berada dalam kondisi rentan, ditandai dengan menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya polarisasi, serta dominasi logika *post-truth*. Dalam hal ini, hoaks diposisikan bukan hanya sebagai gangguan komunikasi, tetapi sebagai gejala krisis demokrasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nabila et al. (2025) yang menunjukkan bahwa disinformasi berkontribusi terhadap krisis legitimasi dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi publik. Dari perspektif hermeneutik, makna tersebut tidak hanya berasal dari teks itu sendiri, tetapi juga dari horizon pemahaman yang melatarbelakangi produksi teks, termasuk nilai, ideologi, dan kepentingan media.

Lebih jauh, posisi media sebagai *fact-checker* dalam pemberitaan hoaks menunjukkan adanya peran ganda, yaitu sebagai penyampai informasi sekaligus sebagai aktor normatif yang berupaya menjaga rasionalitas publik. Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, media juga secara tidak langsung mereproduksi narasi krisis demokrasi melalui pilihan bahasa, penekanan isu, dan konstruksi wacana. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga turut membentuknya, sebagaimana ditegaskan dalam kajian framing dan konstruktivisme.

Ketiga, pembahasan mengenai konteks sosial-politik menunjukkan bahwa framing hoaks politik tidak dapat dipisahkan dari dinamika kontestasi Pemilu 2024. Dalam situasi politik yang kompetitif, hoaks menjadi bagian dari strategi komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi opini publik. Media kemudian merespons fenomena ini dengan membingkai hoaks dalam kerangka konflik, baik sebagai bentuk delegitimasi maupun sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Temuan ini sejalan dengan Belinda et al. (2024) yang menyatakan bahwa disinformasi dalam pemilu merupakan bagian dari strategi politik yang terorganisir.

Selain itu, karakteristik media digital yang cepat dan berbasis viralitas turut memengaruhi proses framing. Media tidak hanya dituntut untuk akurat, tetapi juga cepat dalam merespons arus informasi. Kondisi ini menciptakan tekanan tersendiri yang berpotensi memengaruhi cara media membingkai isu, termasuk dalam pemberitaan hoaks. Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting yang memperkuat dampak framing media, sebagaimana dikemukakan oleh Ahdarrijal dan Rahmawati (2024).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa framing hoaks politik dalam media online merupakan hasil interaksi antara struktur media, praktik diskursif, dan konteks sosial-politik yang lebih luas. Pendekatan hermeneutika dalam penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan mengungkap dimensi makna yang tidak selalu tampak secara eksplisit dalam teks. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian framing media dengan menempatkannya dalam perspektif interpretatif yang lebih mendalam.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pemahaman yang lebih kritis terhadap peran media dalam demokrasi digital. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai kebenaran, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kekuatan dalam membentuk wacana publik. Oleh karena itu, penguatan literasi media menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu memahami konstruksi makna di baliknya. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan yang mengintegrasikan analisis framing dengan pendekatan kritis lainnya untuk memahami dinamika komunikasi politik di era disinformasi.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa framing hoaks politik dalam pemberitaan media online Indonesia merupakan praktik diskursif yang tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan konstruksi makna yang merepresentasikan dinamika demokrasi kontemporer. Struktur framing yang digunakan media secara konsisten mengikuti pola Entman, namun dalam implementasinya menunjukkan kecenderungan normatif, di mana hoaks diposisikan sebagai ancaman terhadap legitimasi demokrasi. Melalui proses interpretasi hermeneutik, ditemukan bahwa framing tersebut tidak hanya berfungsi sebagai klarifikasi informasi, tetapi juga membangun narasi tentang krisis demokrasi yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya polarisasi, dan menguatnya logika post-truth. Selain itu, konstruksi makna dalam pemberitaan hoaks politik sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik, terutama dalam situasi kontestasi Pemilu 2024, serta oleh karakteristik media digital yang menuntut kecepatan dan responsivitas. Dengan demikian, media tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk persepsi publik terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan literasi media dan literasi digital di masyarakat agar publik mampu memahami dan mengkritisi framing media secara lebih reflektif. Selain itu, media diharapkan dapat menjaga independensi dan profesionalisme dalam menyajikan pemberitaan, khususnya dalam isu hoaks politik, agar tidak terjebak dalam reproduksi narasi yang justru memperdalam krisis kepercayaan publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan analisis lintas media atau studi komparatif, serta mengintegrasikan perspektif kritis lainnya untuk memperkaya pemahaman mengenai relasi antara media, disinformasi, dan demokrasi di era digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahdarrijal, Y., & Rahmawati, D. E. (2024). Digital media and democracy in Indonesia. *Journal of Society and Media*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/view/29742>
- Ahdarrijal, Y., & Rahmawati, D. E. (2024). The role of digital media in democracy. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/view/29742>
- Amriani, A. (2024). Pendekatan konstruktivisme dalam framing media. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/42243/>
- Andreas, R. (2024). The urgency of strengthening legal morality in digital society. *Responsive Law Journal*. <https://ejournal.imbima.org/index.php/law/article/view/258>
- Belinda, F., Somantri, G. R., & Runturambi, A. J. S. (2024). Information manipulation in Indonesia's election.
- Caesarannisa, R. (2025). Analisis framing dan interpretasi hermeneutik dalam pemberitaan media. <https://senakom.budiluhur.ac.id/sk/article/view/194>
- Dwiyanti, R., & Putri, S. A. R. (2023). Analisis framing dalam media digital. *Orasi Journal*. <https://journal1.uinss.ac.id/index.php/orasi/article/view/13519>
- Farid, A. S. (2024). Media framing strategy in coverage of regional elections. *Communicator Journal*. <http://ejournal.pdtii.org/index.php/comm/article/view/81>
- Fensi, F. (2025). Hermeneutics of social media debates on identity politics. *Bricolage Journal*. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/bricolage/article/view/7133>
- Hakim, L., & Nurabwani, A. (2024). Media framing in the 2024 presidential election contestation. *Muslim Heritage Journal*. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/10864>

- Hardiyana, I. A. (2026). Metode framing dalam studi komunikasi. <https://senakom.budiluhur.ac.id/sk/article/view/156>
- Holil, S. (2023). Analisis framing media online berbasis hermeneutik. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1269/>
- Indainanto, Y. I., Bangun, I. C., & Nasution, F. A. (2025). Political framing in digital media and public opinion. *Journal of Elections*. <https://jurnal.literasipublisher.co.id/index.php/jepp/article/view/63>
- Iskandar, D., & Suryawati, I. (2023). Public communication model in combating hoaxes and fake news ahead of the 2024 general election. *Journal of Social Studies*. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ijesss/article/view/856>
- Kulsum, N. M., Ginting, S., & Salim, A. (2025). Misinformation and digital public sphere in Indonesia. *Jurnal ISKI*. <https://jurnal-iski.or.id/index.php/jkiski/article/view/1386>
- Muhammad, B. R. (2022). Analisis framing konflik dalam media online. <https://digilib.unila.ac.id/69576/>
- Nabila, K. N., Fitriana, F., & Meisya, S. B. (2025). Media, disinformation, and public decoding. <https://jurnal.machung.ac.id/index.php/klausa/article/view/1332>
- Nema, K., Park, B. S. F., & RVA, R. (2025). Framing reality in post-truth context. <https://www.researchgate.net/publication/397670441>
- Nuraini, F. P., Mulyana, D., & Herawati, M. (2024). Framing analysis of international conflict in media. *Kajian Jurnalisme*. <https://journals.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/view/55562>
- Pratama, H. G., Bajari, A., & Fadilah, E. (2025). Media's role in reporting 2024 Indonesian election fraud. *Wacana*. <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/4937>
- Ramadani, N., Pratiwi, F. S., & Syafi'i, K. (2025). Framing dan interpretasi hermeneutik dalam media sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*. <https://indojurnal.com/index.php/jisoh/article/view/1677>
- Rina, R. (2021). Teknik hermeneutik dalam analisis media. <https://repository.uir.ac.id/12181/>
- Sianipar, H., Saleh, R., & Bakti, A. F. (2026). Hermeneutic analysis of political narratives in media. *Eduvest Journal*. <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/52041>
- Siregar, I. (2025). The negative effects of political buzzers on people's communication intelligence. *Polit Journal*. <https://mail.biarjournal.com/index.php/polit/article/view/1303>
- Subekti, D., Yusuf, M., & Saadah, M. (2025). Social media and disinformation for candidates: the evidence in the 2024 Indonesian presidential election. *Frontiers in Political Science*. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2025.1625535>
- Suherman, A., Hidayatullah, M., & Mulia, F. (2026). Information disorder and electoral integrity. *IntechOpen*. <https://www.intechopen.com/chapters/1234241>
- Tobing, N. R., Wendratama, E., & Sumono, N. (2024). Countermeasures against disinformation in Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/400271243>
- Widodo, S., & Kristiyono, J. (2025). Digital democracy and political communication. *Jurnal Studi Komunikasi*. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/9524>
- Yilmaz, I., Triwibowo, W., & Bachtiar, H. (2024). Competing populisms, digital technologies and the 2024 elections in Indonesia. <https://www.academia.edu/download/120219913>